

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Strategi Pemerintah**

##### **2.1.1 Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos* gabungan dari *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Strategi merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan dimana dalam strategi itu terdapat metode dan teknik. Strategi bisa juga dikatakan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengertian pemerintah atau dalam istilah Inggris “government” merupakan sebuah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Quinn, strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian

---

<sup>1</sup> Eris Juliansyah. Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi. Jurnal Ekonomak Vol.3.2017. Hlm 21.

tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Untuk menganalisis strategi suatu organisasi yaitu :

a. Tujuan organisasi, dalam hal ini melihat kepada tujuan atau visi misi yang diterapkan oleh organisasi tersebut.

b. Kebijakan organisasi, dalam hal ini melihat kepada kebijakan yang diimplementasikan oleh organisasi tersebut.

c. Aksi utama organisasi, dalam hal ini melihat kepada program-program dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh organisasi.

Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.<sup>2</sup>

Jadi, strategi merupakan hal yang penting karena strategi mendukung tercapainya suatu tujuan . Strategi mendukung sesuatu yang unik dan berbeda dari lawan, dan strategi juga dapat mempengaruhi kesuksesan masing-masing perusahaan karena pada dasarnya strategi dapat dikatakan sebagai rencana untuk jangka panjang.

---

<sup>2</sup>Ibid

### **2.1.2 Tahap-Tahap Penyusunan Strategi**

Setiap instansi pasti mempunyai strategi untuk mencapai suatu tujuan dan membutuhkan perencanaan yang matang agar memperoleh hasil yang diinginkan dalam menjalankan strategi. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, keputusan strategi untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif<sup>3</sup>.

Tahapan penyusunan strategi meliputi :

1. Identifikasi masalah merupakan sebagai tahap awal untuk menyusun strategi dengan berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Proses identifikasi masalah tersebut dapat dilakukan menggunakan metode brainstorming atau polling pendapat sebagai upaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada.

2. Pengelompokan masalah dari tahapan identifikasi masalah di atas akan muncul masalah baru yang beraneka ragam. Maka dari itu untuk mempermudah cara pemecahannya, perlu dilakukannya pengelompokan/pengklasifikasian masalah yang sesuai dengan sifat atau karakter tujuan pengelompokan masalah tersebut.

---

<sup>3</sup>Ayu Rahadiani, Azis Muslim. Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK). Vol.4, No.2.2023. Hlm 97

3. Proses abstraksi setelah kelompok masalah terbentuk, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah-masalah krusial dari tiap kelompok. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis terhadap masalah tersebut guna mencari faktor penyebab timbulnya masalah. Tahap ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena faktor-faktor ini akan disusun bersamaan dengan metode pemecahan masalahnya.

4. Penentuan cara pemecahan masalah setelah tahap abstraksi selesai dilakukan, hal berikutnya yang dilakukan adalah menyelesaikan/memecahkan masalah yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Metode atau cara penyelesaian masalah ini harus konkret dan spesifik.

5. Perencanaan untuk implementasi tahapan untuk menyusun strategi di atas merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Namun hal terpenting dari semua penyusunan tersebut adalah mengimplementasi seluruh penyusunan strategi yang sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Strategi berkaitan dengan perumusan misi (apa yang harus dilakukan sebagai bentuk usaha), tujuannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan inisiatif-inisiatif (kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu tanpa harus diberitahu) strategi yang baru.

Makna lain dari strategi yaitu<sup>4</sup> :

-strategi sebagai satu perencanaan (*plan*)

-strategi sebagai lompatan (*ploy*)

-strategi sebagai pola (*pattern*)

-strategi sebagai pengambilan posisi (*position*)

-strategi sebagai persepsi (*perception*)

Menurut Hisyam Alie, untuk mencapai strategi yang strategis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. *Strength* (keunggulan).
- b. *Weakness* (kelemahan).
- c. *Opportunity* (peluang).
- d. *Threats* (ancaman).

Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strategi digunakan dalam penelitian ini adalah tipe corporate strategi (strategi organisasi). Hal demikian dikarenakan strategi organisasi lebih mengutamakan pada perumusan misi, tujuan dan inisiatif-inisiatif baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Selain itu, strategi program 5 juga mengutamakan pembatasan-pembatasan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan untuk apa sebuah strategi

---

<sup>4</sup> Dr. Taufiqurrohman, S.Sos., M.Si. (2016). Manajemen Strategik. Jakarta : Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama

dibuat,serta bagaimana pelaksanaannya. Sebuah strategi yang efektif memerlukan keterlibatan dan kepemilikan yang luas,namun strategi tersebut juga harus dipimpin dari tingkat yang paling atas. Strategi pemerintahan juga bagian dari penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik secara sistematis dari badan-badan publik untuk mencapai barang publik.

Menurut teori strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan yang menyatakan “*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*” yang berarti strategi publik adalah penggunaan sistematis sumber daya dan kekuasaan publik oleh badan-badan publik untuk mencapai tujuan barang-barang milik umum. Strategi Geoff Mulgan ini lebih berbicara mengenai strategi yang diperuntukan organisasi pembuat kebijakan (pemerintah),dimana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan pengertian diatas, indikator strategi pemerintahan diuraikan menjadi 5 yaitu<sup>5</sup> :

-Tujuan (*purposes*),dapat diartikan sebagai sebuah tujuan membutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut.

-Lingkungan (*environment*), indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari sebuah perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar (*changes in*

---

<sup>5</sup>Suwarsono Muhammad.2013.Strategi Pemerintahan (Manajemen Organisasi Publik). Yogyakarta : Erlangga. Hlm .70

*ambient conditions*) dan perubahan pada kesehatan manusia (*change of human health*).

-Pengarahan (*directions*), yaitu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota atau organisasi hingga berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran tersebut. Bagian dari pengarahan yaitu koordinasi, motivasi, komunikasi dan perintah.

-Aksi (*action*), yaitu dilihat dari situasi eksternal (luarnya), perangkat yang digunakan dan pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan melakukan sebuah tindakan.

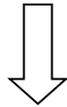
-Belajar (*learning*), pada bagian ini menggunakan metode perbandingan dan identifikasi.

Tujuan dari strategi adalah kunci dari arah perubahan masa depan, yang mengarah pada apa yang hendak dikejar waktu yang akan datang dan arahan tersebut harus jelas arah dan tujuannya.

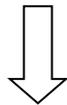
Menurut Josef Mario Monteiro yang akan dijalankan oleh pemerintah akan berhasil apabila semua terlaksana dengan baik. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu : 1). *Sosialisasi*, 2). *Regulasi*, 3). *Sanksi*. Menurut Josef Mario Monteiro ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarluaskan peraturan daerahnya agar lebih efektif dan menyuluruh kepada seluruh masyarakat diwilayahnya.

Menurut Hunger dan Wheelen menetapkan tahapan-tahapan strategi sebagai berikut<sup>6</sup> :

Pengamatan Lingkungan



Perumusan Strategi



Implementasi Strategi



Evaluasi dan Pengendalian

### **Bagan 2.1 Tahap-Tahap Strategi**

Tahapan strategi mencakup 5 bagian yaitu :

-Analisis lingkungan yaitu mengidentifikasi peluang (oppurtunity) yang harus segera mendapatkan perhatian dan menentukan beberapa kendala ancaman (threats) yang perlu diantisipasi.

-Penetapan misi dan tujuan yaitu sebuah organisasi pasti memiliki misi dan tujuan. Misi adalah suatu tujuan yang unik yang membedakannya dengan organisas-organisasi lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya

---

<sup>6</sup>Septyarini Dwi Pramingtyas.Manajemen Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Jawa Timur.Jurnal Administrasi Publik. Hlm 4

sedangkan tujuan adalah landasan utama untuk menggariskan kebijakan yang ditempuh dan arah tindakan untuk mencapai tujuan organisasi.

-Perumusan Strategi yaitu sejumlah tindakan yang terkoordinasi untuk mendayagunakan kompetensi intin serta memperoleh keunggulan bersaing agar memberikan hasil yang maksimal.

-Penerapan (implementasi) strategi yaitu tindakan pengelolaan macam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya organisasi melalui strategi yang dipilih. Implementasi diperlukan untuk merinci secara lebih jelas bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil dapat direalisasikan.

-Evaluasi dan Pengendalian yaitu evaluasi merupakan suatu tahap untuk menjamin bahwa strategi yang telah dipilih itu terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, evaluasi adalah proses membandingkan antara hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan. Pengendalian strategi merupakan pengendalian yang mengikuti strategi yang sedang diimplementasikan, mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi strategi meliputi kegiatan dimana memonitor seluruh hasil dari pembuatan strategi dan penerapan strategi termasuk dalam mengukur kinerja individu atau organisasi dan instansi serta bagaimana mengambil langkah-langkah perbaikan apabila diperlukan.

### **2.1.3 Peranan Strategi**

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi karena meliputi tindakan dan koordinasi dalam mencapai tujuan. Adapun menurut Grant, strategi mencakup 3 peranan penting dalam mencapai suatu tujuan yaitu :

1). Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan, strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai kesuksesan. Strategi suatu hal yang akan memberikan suatu ikatan hubungan antara hasil-hasil dari ide yang diambil oleh individu atau instansi terkait.

2). Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, strategi memiliki peranan penting sebagai sarana koordinasi dan komunikasi agar memberikan kesamaan arah bagi perusahaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

3). Strategi sebagai target, konsep strategi akan disatukan dengan suatu visi untuk menentukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Menetapkan suatu tujuan dapat membantu seorang individu dapat mendengarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

### **2.2 Peran Pemerintah**

Pemerintah atau government secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *kubernan* yang berarti nahkoda kapal. Pemerintah yang dianalogikan sebagai nahkodadituntut untuk menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan negara.

Peranan dapat diartikan sebagai perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan ialah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, maka dari itu setiap seseorang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan. Pemerintah diharuskan untuk mempersiapkan kebijakan untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pada pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik atau *political will* dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pemerintah merupakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Pemerintah mengatur segala suatu sistem yang mengatur kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tersebut.

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah adalah sebuah hak, wewenang dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan kepentingan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Daerah adalah sebuah lingkungan pemerintah dimana wilayah atau daerah diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi, lingkungan kerja pemerintah dan wilayah selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus tempat yang terkena sebuah peristiwa yang sama.

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuan yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan.

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham dilihat dari 3 bentuk sebagai berikut ;

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan sering kali fungsi pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fiikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur

---

<sup>7</sup>Haudi, S.Pd., M.M.2021.Pengantar Ilmu Pemerintahan. Solok : CV Insan Cendekia Mandiri. Hlm : 69

atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong pembaharuan atau pembangunan.

Menurut Labolo menjelaskan peran pemerintah antara lain<sup>8</sup> :

1. Pemerintah sebagai Regulator yaitu pemerintah menyiapkan arah yang digunakan untuk menyeimbangkan pelaksanaan program pembangunan, pembangunan dapat berupa fisik maupun sumber daya manusia dengan pembuatan peraturan-peraturan. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus dapat memberi acuan dasar pada masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan pembangunan.
2. Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu pemerintah memikirkan bagaimana caranya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah dapat berperan dengan memberikan bimbingan dan pengarahannya intensif dan efektif pada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan dengan bentuk tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
3. Pemerintah sebagai Kasilator yaitu pemerintah sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Pemerintah juga bergerak melalui penyediaan fasilitas baik fisik dan non-fisik serta dibidang pendanaan atau permodalan.

---

<sup>8</sup> Dwi Noval Lestari, Nunik Retno Herawati dan Turtiantoro. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 202. Jurnal FISIP. Hlm 5

Local government untuk dimasa depan paling tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah yang bercorak wirausaha, dimana pemerintahan memanfaatkan ketiga komponen sumberdaya : pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

2. Pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas publik mempunyai kewajiban dengan segenap unsur birokrasi dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat menyangkut kegiatan penuh pemerintah termasuk kinerjanya dalam pelayanan publik.

3. Pemerintah daerah yang bercirikan pemerintahan yang baik secara teoritis pemerintahan yang baik mengandung bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

4. Transparansi dalam pemerintah daerah bukan berarti ketelanjangan melainkan keterbukaan dalam artian yang sebenarnya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktivitas pemerintah daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

## **2.3 Konsep Pernikahan Dini**

### **2.3.1 Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat kurang mampu yang ditandai dengan pendapatan yang rendah, kurangnya

pendidikan, kurangnya kesehatan dan aset. Pernikahan dini di negara berkembang termasuk Indonesia berkaitan dengan aspek ekonomi, pendidikan, kependudukan dan sosial kultural.<sup>9</sup>

Pernikahan dini (nikah dibawah umur) bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia bahkan sebuah fenomena yang terjadi hampir disetiap wilayah Indonesia.<sup>10</sup> Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku, tidak hanya terjadi dikota besar saja tetapi dipedesaan juga banyak.<sup>11</sup>

Pernikahan anak dibawah umur adalah bentuk pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Usia ideal anak untuk melangsungkan pernikahan yakni usia 20 tahun bagi perempuan sedangkan laki-laki adalah 25 tahun. Hal ini dikarenakan usia tersebut dianggap paling tepat dalam membangun rumah tangga, usia tersebut dapat diindikasikan sebagai usia yang mampu berfikir dewasa secara rata-rata keputusan ini dibuat demi kebaikan masyarakat.

Faktor penyebabnya pun bervariasi seperti rendahnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur serta seks bebas pada remaja.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Indah Muhadara, Anwar Parawangi dan Ihyani Malik. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Takalar. Jurnal Administrasi Publik. Vol 2 No 3. 2016. Hlm 1

<sup>10</sup> Endro Priherdityo, CNN Indonesia, Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia, (<https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anakmasih-marak-di-indonesia>), diakses 4 Agustus 2023)

<sup>11</sup> Eddy Fadlayana, dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11 No. 2. 2 Agustus 2009. hlm. 136

<sup>12</sup> Meitria Syahadatina Noor, Fauzie Rachmn, Fahrini Yulidasari, dkk. 2018. "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Cet Ke1. Yogyakarta : CV Mine. Hlm 2.

Menurut Satriyandari pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal secara fisik,mental maupun materi. Inilah alasan pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru dan segala persiapannya belum dipersiapkan secara matang.<sup>13</sup>

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Penggunaan istilah kawin hanya digunakan untuk hewan dan tumbuhan. Hal ini berbeda makna dengan sebuah kata “pernikahan” yang digunakan untuk manusia karena mengandung sebuah keabsahan baik ditinjau dari hukum nasional,adat istiadat dan agama.

### **2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Menurut Satriyandari yang dimaksud oleh faktor penyebab pernikahan dini adalah hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan oleh remaja dengan usia dibawah batas yang telah ditentukan. Beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini yaitu :

a. Faktor orang tua yang tidak memberikan pengawasan terhadap anak, keluarga dapat menimbulkan tindak negatif remaja sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya berdampak terhadap perkawinan dibawah umur dikarenakan perilaku anak bukan hanya dari pengaruh lingkungan yang selama ini dikatakan

---

<sup>13</sup>Dwi Noval Lestari,Nunik Retno Herawati dan Turtiantoro. Jurnal Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021. Jurnal FISIP.Hlm 6

orang bahwa anak tergantung tempat dimana ia bergaul tetapi yang sebenarnya tergantung juga kepada bagaimana dan kemana orang tua mengarahkannya.

b. Faktor kemiskinan, merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan masyarakat dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang kurang mampu. Orang tua akan menikahkan anaknya dengan alasan bahwa ekonomi yang menjadi faktor utama dalam menghidupi keluarganya sehingga untuk mengurangi beban maka akan segera menikahkan anaknya.

c. Faktor Pendidikan, pada saat ini rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan anak dan orang tua serta masyarakat telah banyak menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur.

Adapun faktor lain yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia dini yaitu<sup>14</sup> :

1. Pendidikan yang rendah, salah satu penyebab banyaknya terjadi pernikahan dini dimana banyak anak muda tidak bisa melanjutkan sekolah mengakibatkan adanya dorongan untuk cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena tidak tahu lebih mendalam tentang perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan

---

<sup>14</sup>Dahriah, Abdul Jabbar dan Muhammad Rusdi. Strategi Pemerintah Daerah Menimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal FISIP. Hlm 1

melahirkan anak. Selain itu juga tingkat pendidikan keluarga yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda.

2. Peraturan budaya, merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini, usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita.

3. Kecelakaan, tidak sedikit pernikahan dini disebabkan karena “kecelakaan” yang tidak disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus bertanggung jawabkan perbuatan dengan menikah secara dini. Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan secara dini. Pernikahan dini biasanya tidak akan bertahan lama karena landasannya tidak kuat.

### **2.3.3 Dampak Pernikahan Dini**

Beberapa dampak permasalahan dalam pernikahan usia dini ialah<sup>15</sup> :

1. Pendidikan anak, dimana anak tidak akan dapat mewujudkan impian dan keinginannya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki anak tersebut akan mulai berkurang karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah.

2. Kekerasan rumah tangga, perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial.

---

<sup>15</sup>Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum. Monograf Perkawinan Anak. (Sebuah Analisis Pelanggaran Terhadap Hak Anak). 2022. Malang : Madza Media. Hlm.51-52

Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan resiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

3. Dampak psikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Apabila ditinjau dari berbagai aspek, perkawinan usia anak memang memiliki banyak dampak negatif. Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti mengenai hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, perkawinan usia anak dapat membawa penyesalan pada diri anak dikarenakan ia tidak mengerti atas keputusan menikah dalam hidupnya.

4. Dampak biologis, secara biologis alat reproduksi seorang anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika harus hamil dan kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi anak bahkan dapat membahayakan jiwa anak.

5. Dampak kesehatan Perempuan yang menikah di usia kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi. Dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita

yang menikah usia anak antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini dikarenakan terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya, pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

6. Dampak sosial, pada fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender dan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah sebuah rangkaian konsep dan kejelasan hubungan yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian. Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus walaupun ada beberapa urusan pemerintah yang tidak bisa dilimpahkan.

Penelitian ini akan membahas bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

## Bagan 2.1 Kerangka Pikir

